

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Gereja adalah institusi religius sekaligus sosial. Kedua dimensi itu, baik sebagai institusi religius maupun sosial, tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sejarah panjang perjalanan hidup Gereja. Gereja Katolik sebagai sebuah institusi religius lazim disebut sebagai agama (*religion*). Ungkapan dalam bahasa Latin yang merujuk pada term agama, yaitu *religio* berasal dari *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Dalam artinya yang paling asli, agama adalah sarana yang mengikat kembali dunia dan sejarah pada Yang Kudus serta menunjukkan keterlibatan Yang Kudus dalam dunia dan sejarah.¹ Definisi hakiki agama itu menunjukkan bahwa selain menjadi sarana bagi manusia untuk mengalami perjumpaan dengan Yang Kudus atau Allah, agama juga menjadi moment keterlibatan Allah dalam sejarah pergulatan kehidupan manusia. Dengan kata lain, agama tidak hanya berurusan dengan persoalan tentang membangun relasi dengan Allah tetapi juga tentang Allah yang terlibat dalam kehidupan manusia serta bagaimana manusia yang beragama berelasi dengan sesamanya.

Dalam kiprahnya di tengah dunia, Gereja senantiasa menunjukkan peran dan kontribusinya dalam membangun tatanan kehidupan yang berpihak pada nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hal itu bersinggungan langsung dengan aspek keterlibatan sosial Gereja, yaitu keterlibatan Gereja dalam menanggapi pelbagai masalah sosial yang mendera kehidupan manusia. Babak baru dalam sejarah keterlibatan sosial Gereja dibuka oleh Paul Leo XIII, yaitu dengan menerbitkan *Rerum Novarum*, sebuah ensiklik yang secara khusus berisi tentang tanggapan Gereja atas situasi penderitaan yang dialami kaum pekerja akibat sistem kapitalisme yang memiskinkan mereka. Ensiklik itu berupaya menggariskan prinsip-prinsip bagi suatu pemecahan masalah yang sungguh-sungguh adil dan layak.² Pada dasarnya, prinsip pokok keterlibatan sosial Gereja adalah bahwa manusia sebagai pribadi merupakan dasar, sebab, dan

¹ Paul Budi Kleden, *Di Tebing Waktu Dimensi Sosio-Politis Perayaan Kristen* (Mauere: Ledalero, 2009), hlm. vi.

² Koerniatmanto Soetoprawito, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 58.

tujuan yang utama bagi setiap lembaga sosial.³ Dengan kata lain, fokus keprihatinan utama keterlibatan sosial Gereja adalah martabat pribadi manusia yang harus diakui dan dipertahankan.

Lebih lanjut, keterlibatan sosial Gereja merupakan bentuk komitmen moral Gereja atas permasalahan sosial yang dihadapi manusia dalam segala zaman. Komitmen moral ini adalah manifestasi cinta kasih Gereja terhadap kehidupan manusia. Tentang hal itu, *Gaudium et Spes*, salah satu konstitusi pastoral yang diterbitkan selama Konsili Vatikan II menyatakan bahwa kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan setiap orang terutama orang miskin dan menderita adalah juga milik para murid Kristus.⁴ Situasi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, dengan kompleksitas persoalannya adalah medan tempat Gereja berkarya. Panggilan dan misi Gereja, sesuai dengan misi utama dari teladan sejati iman Kristiani, yaitu Yesus Kristus adalah menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia. Tegakknya Kerajaan Allah itu termanifestasi dalam situasi dunia yang adil, damai, dan sejahtera.

Dalam kenyataannya, kehidupan manusia tidak hanya diwarnai oleh situasi keselamatan dan pengalaman kegembiraan tetapi juga aneka problem yang membuat manusia hidup dalam kecemasan dan kedukaan. Berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, *human trafficking*, kelaparan, dan krisis lingkungan hidup merupakan hambatan yang menghalangi Gereja dalam merealisasikan misi keselamatannya di tengah dunia. Fenomena-fenomena patologis tersebut menantang Gereja untuk merefleksikan kembali arti penting kehadirannya dalam mengusung agenda pembebasan dan penyelamatan umat manusia.

Salah satu kenyataan patologis yang menghalangi cita-cita dan misi Gereja untuk menyelamatkan umat manusia adalah kemiskinan. Kemiskinan hingga saat ini masih merupakan fenomena global yang menggerogoti sebagian besar penduduk di berbagai belahan dunia. Akar kemiskinan yang banyak terjadi di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang adalah globalisasi ekonomi yang dimotori oleh para pemodal yang sebagian besar berdomisili di negara-negara maju. Globalisasi ekonomi itu nyata dalam terintegrasinya sebagian besar negara ke dalam sistem ekonomi kapitalisme global atau yang akhir-akhir ini lazim disebut neoliberalisme. Gambaran umum dan biasa dari ekonomi dunia hari ini adalah adanya kesenjangan yang semakin meningkat akibat akumulasi kekayaan di tangan segelintir pemodal

³ *Ibid.*, hlm. 67.

dan pada saat yang sama kemiskinan masif yang dialami warga di negara-negara berkembang. Selain itu, penduduk miskin juga masih dijumpai di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Swis, dan Perancis.⁵

Untuk konteks Indonesia, sistem ekonomi kapitalisme yang juga diadopsi dalam pelbagai kebijakan pembangunan ekonomi-politik di negara ini juga mengakibatkan jurang yang semakin lebar antara sebagian kecil pemodal dan mayoritas rakyat yang hidup miskin. Menurut perhitungan *Majalah Forbes*, sebagaimana dikutip Alex Jebadu, jumlah kekayaan dari 25 orang bilioner Indonesia pada tahun 2013 adalah US\$55,1 miliar yang nilainya sama dengan setengah dari APBN Indonesia pada tahun 2011, yaitu \$110, 116 miliar.⁶ Di sisi lain, sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan Badan Pusat Statistik pada Maret 2021 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta. Jumlah tersebut menurun tipis, yaitu 0,001 juta orang dibandingkan pada September 2020. Namun, dibandingkan periode sebelumnya (Maret 2020), jumlah penduduk miskin pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 1,12 juta orang. Situasi pandemi yang memporakporandakan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia.⁷

Sebagai problem nasional, fakta kemiskinan di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari kemiskinan yang melilit kehidupan penduduk di berbagai daerah di negeri ini. Salah satu provinsi yang selalu tergolong provinsi miskin adalah NTT.⁸ Kemiskinan, sebagai problem

⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

⁵ John Madeley, *Big Business Poor Peoples Bisnis Besar Menguasai Masyarakat Miskin, Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Transnasional Merusak Kehidupan Orang-Orang Miskin di Berbagai Negara*, terj. Alex Jebadu (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2013), hlm. 28.

⁶ Alexander Jebadu, *Bahtera Terancam Karam Lima Masalah Sosial Ekonomi dan Politik Yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 24-25.

⁷ Fika Nurul Ulya, "BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021", <https://money.kompas.com>, diakses pada 12 Februari 2023.

⁸ Pada Maret 2021, angka kemiskinan di NTT mengalami penurunan yaitu sebesar 20,99 persen dibandingkan dengan periode September 2020 yaitu sebesar 21,1 persen. Penurunan itu merupakan suatu pencapaian yang menggembirakan di tengah gempuran pandemi Covid 19. Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan itu tidak terlepas dari berbagai langkah dan terobosan strategis yang diambil pihak pemerintah provinsi, di antaranya memacu produktivitas ekonomi melalui implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional, percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi, dan berbagai bantuan sosial (*Media Indonesia.com*, 17 Agustus 2021, "Angka Kemiskinan di NTT Turun 0,22 poin"). Kendati demikian, masih ada lima kabupaten di NTT yang masih berstatus daerah kemiskinan ekstrem, yaitu Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten itu mencapai 212.672 orang dan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 rumah tangga (*CNN Indonesia*,

sosial utama yang masih menghantui masyarakat NTT, juga menjadi salah satu keprihatinan pastoral Keuskupan Ruteng, yaitu salah satu keuskupan yang memiliki wilayah administratif-yuridis di provinsi NTT. Wilayah Keuskupan Ruteng terdiri atas tiga kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Berdasarkan temuan dalam Sinode III 2013-2015, selain disebabkan karena faktor internal pribadi umat (keterbatasan sumber daya manusia, pola hidup konsumtif, mental malas, sikap fatalistis dalam memandang kemiskinan, kurang kreatif dalam pengelolaan keuangan), akar kemiskinan adalah persoalan struktural, yaitu situasi, sistem, institusi, dan berbagai aturan hidup bersama yang menyebabkan proses pemiskinan dalam kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme, misalnya menyebabkan perekonomian dikuasai pemilik modal sehingga dunia pertanian atau petani bergantung pada pupuk pabrik yang dikuasai pemodal. Efek lainnya adalah harga komoditi yang ditentukan oleh segelintir orang yang mengendalikan pasar. Selain itu, secara politik, kemiskinan juga disebabkan karena sistem politik yang koruptif, menguntungkan penguasa dan pemodal, dan merugikan masyarakat. Contohnya, politik pembangunan atau politik anggaran yang tidak didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang memenuhi kebutuhan rakyat banyak (misalnya pembangunan jalan dan jembatan di pedesaan).⁹

Bertolak dari fakta kemiskinan yang melanda kehidupan sebagian besar umat Keuskupan Ruteng, Gereja Keuskupan berikhtiar merancang visi pastoral baru, yaitu pastoral kontekstual integral. Pastoral yang kontekstual berarti pastoral yang bertolak dari situasi riil situasi kehidupan umat, baik situasi kegembiraan maupun berbagai pengalaman negatif. Pastoral Gereja tidak hanya bertolak dari dogma atau doktrin yang abstrak, tetapi dari pengumpulan kehidupan manusia yang konkret. Dalam bingkai pemahaman tersebut, analisis sosial yang tajam dan refleksi teologis untuk menilai situasi konkret kehidupan umat adalah suatu kemendesakan. Analisis itu kemudian pada gilirannya ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan pastoral. Sementara itu, pastoral integral menegaskan bahwa reksa pastoral harus melayani manusia secara utuh dan holistik, yang mencakup rohani dan jasmani, personal, sosial, dan ekologis. Pastoral integral meliputi keselarasan seluruh bidang kehidupan Gereja, yakni

18 Oktober 2021, "Lima Kabupaten di NTT Alami Kemiskinan Ekstrem). Hal itu menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi problem sosial utama di NTT.

⁹ Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, *Dokumen Sinode II 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral*, (Yogyakarta: asdaMedia, 2017), hlm.199.

pewartaan, pengudusan, dan pelayanan sosial.¹⁰ Dengan kata lain, pastoral Gereja tidak boleh hanya berkuat pada persoalan seputar ritus (*sakramensentris/liturgisentris*) tetapi juga mesti merancang kebijakan-kebijakan yang bisa memecahkan dan menjawab persoalan konkret kehidupan umat.

Dalam karya ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan usaha yang sudah dilakukan Gereja Keuskupan Ruteng dalam mengentas kemiskinan. Penulis akan memperkenalkan sekaligus mengelaborasi lebih jauh visi pastoral kontekstual-integral yang dicanangkan Gereja Keuskupan Ruteng dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang masih mendera umat di wilayah tersebut. Karena itu, karya ini diberi judul PERAN GEREJA KEUSKUPAN RUTENG DALAM MENGENTAS KEMISKINAN BERDASARKAN VISI PASTORAL KONTEKSTUAL INTEGRAL DALAM DOKUMEN SINODE III 2013-2015.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Masalah pokok yang diangkat dalam karya ini adalah “Bagaimana peran Gereja Keuskupan Ruteng dalam mengentas kemiskinan berdasarkan visi pastoral kontekstual integral dalam dokumen Sinode III 2013-2015”? Bertolak dari masalah pokok tersebut, ada beberapa masalah turunan yang akan dibahas, yaitu *pertama*, bagaimana gambaran umum Gereja Keuskupan Ruteng? *Kedua*, apa itu kemiskinan? *Ketiga*, bagaimana realitas kemiskinan yang dialami umat Gereja Keuskupan Ruteng? *Keempat*, bagaimana peran Gereja Keuskupan Ruten dalam mengentas kemiskinan berdasarkan visi pastoral kontekstual integral dalam dokumen Sinode III 2013-2015?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui realitas kemiskinan umat Keuskupan Ruteng. Selain itu penulis ingin melihat sejauh mana peran gereja keuskupan Ruteng dalam mengentas realitas kemiskinan di Keuskupan Ruteng.

¹⁰ *Ibid.*

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan kuliah pascasarjana di IFTK Ledalero.

1.4 METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode kualitatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penulis mencoba untuk menganalisis, memahami, mendalami dan menjelaskan Peran gereja keuskupan ruteng dalam mengentas kemiskinan berdasarkan visi pastoral kontekstual integral dalam dokumen sinode III 2013-2015. Sumber-sumber tulisan ini berasal dari buku-buku, majalah, artikel, juga dari internet. Penulis yakin bahwa dengan sumber-sumber seperti itu, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini tepat waktu.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Demi mempermudah pembahasan, tulisan ini dibagi dalam lima bab besar, yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: Gereja Keuskupan Ruteng. Bab ini berisikan gambaran umum tentang gereja keuskupan ruteng dan gambaran umum kehidupan umat keuskupan ruteng.

BAB III: Bab ini berisikan pengertian kemiskinan, penyebab kemiskinan, perkembangan definisi kemiskinan, cara mengukur kemiskinan, sebab-sebab kemiskinan, langkah praktis yang perlu dibuat untuk mengentas kemiskinan.

BAB IV: Bab ini merupakan bab inti karena itu pada bab ini akan secara khusus membahas Peran gereja keuskupan ruteng dalam mengentas kemiskinan berdasarkan visi pastoral kontekstual integral dalam dokumen sinode III 2013-2015.

BAB V: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.